



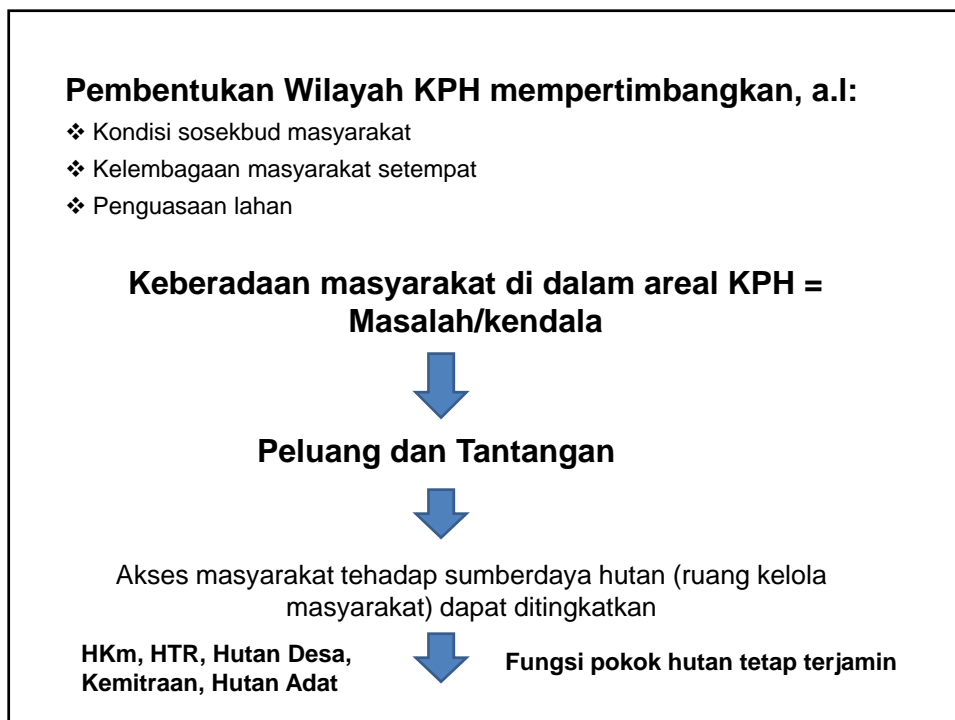
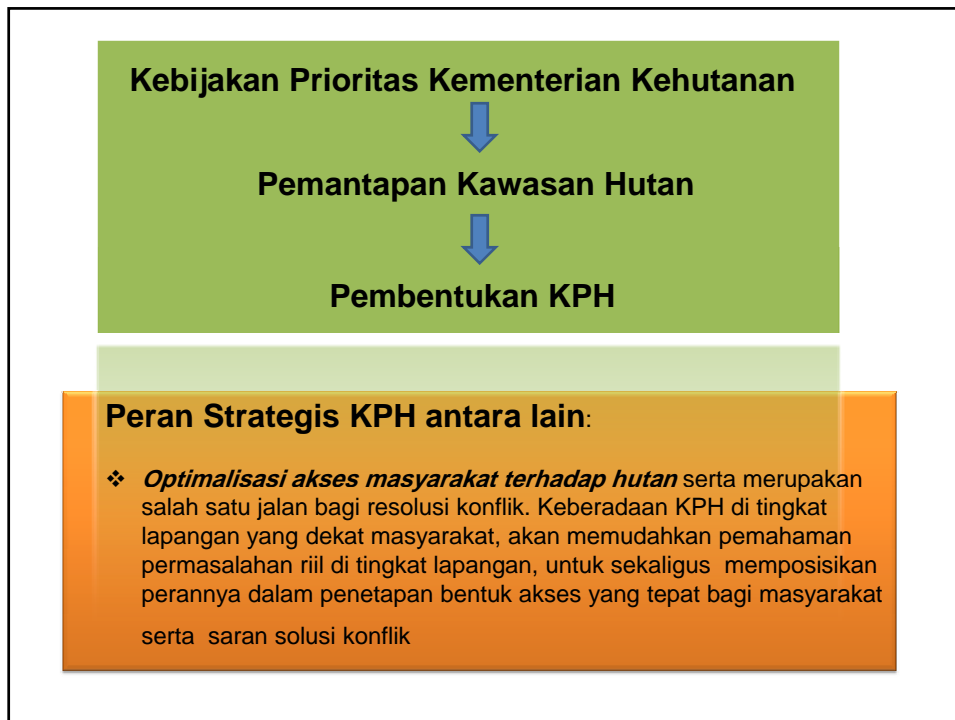
Latar Belakang:

Konflik tenurial (sistem tenurial yang belum jelas*) dalam pengelolaan hutan masih terus berlangsung:

- Batas-batas kawasan hutan yang belum disepakati bersama oleh Pemerintah dan masyarakat
- Penguasaan lahan dalam kawasan hutan (*de facto*) oleh masyarakat
- Belum diakomodir dengan baik keberadaan masyarakat dalam kawasan hutan dalam perencanaan pembangunan kehutanan



* Sistem tenurial menentukan siapa yang memiliki dan siapa yang dapat menggunakan sumberdaya, berapa lama dan pada kondisi apa (Haryanto R. Putro, 2010)



Analisis Land Tenure dalam Pengelolaan KPH:

- ❖ RATA : *Rapid Land Tenure Assessment*
- ❖ HuMA-win : Sistem Database konflik berbasis window
- ❖ AGATA : Analisis Gaya Pihak Bersengketa



Membantu memetakan permasalahan land tenure secara riil dan komprehensif di lapangan



Resolusi konflik; penetapan bentuk akses masyarakat

APA ITU RATA

- RaTA (*Rapid Land Tenure Assessment*/ Penilaian Sistem Penguasaan Tanah secara Cepat) adalah seperangkat cara sistematis untuk menilai, menganalisis, memahami dan menjelaskan secara ringkas klaim-klaim antar pihak atas sda
- Lebih bersifat penelitian pendahuluan untuk memeriksa apakah terjadi tumpang tindih klaim atas sumber-sumber agraria

Penyisiran Data (dengan bantuan check list)

• Basis legitimasi klaim rakyat:

– Status Tanah (Tata Kuasa)

- Asal Usul Tanah
 - Bentuk Perolehannya (Beli, Pinjam dll)
 - Waktu kedatangan
 - Siapa saja, kuburannya
 - Keturunannya
 - Pengalihan /Pendaftaran Tanah tanah serta bukti buktinya

– Perencanaan Pengelolaan (Tata Kelola)

- Bentuk Pengelolaan Tanahnya
 - Pondok & Huma
 - Talun
 - Kebun Buah/Karet/Hutan

– Perijinan (Tata Perijinan)

- Peminjaman lahan /penyewaan pada pihak lain
 - Gadai dll

• Basis legitimasi klaim negara & swasta:

– Status Tanah (Tata Kuasa)

- Tanah Negara/Bukan Tanah Negara
 - Kawasan Hutan Negara ?
 - » Penunjukkan Kawasan Hutan
 - » Penataan Batas
 - » Penetapan Kawasan Hutan Negara

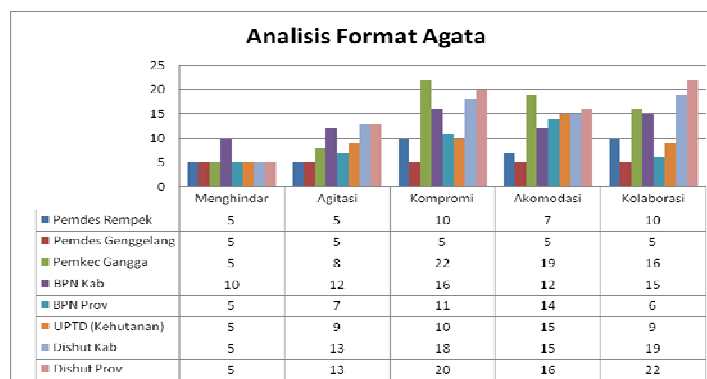
– Perencanaan Pengelolaan (Tata Kelola)

- Rencana tata Ruang Nasional
- Propinsi
- Kabupaten

– Perijinan (Tata Perijinan)

- Peijinan yang diterbitkan oleh pihak yang berhak

AGATA :



TERIMA KASIH